

Penyuluhan Hukum Pentingnya Masyarakat Ikut Serta Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Maria Ferba Editya¹, Rocky Batanta Brahmana²

^{1,2} Universitas Quality Berastagi, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Maria Ferba Editya

E-mail : Maria.juntakk@yahoo.com

Abstrak

Kegiatan PKM berupa sosialisasi pentingnya partisipasi pemilih pemula untuk masyarakat Desa Sempajaya dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2024. Tujuan PKM ini 1) Untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat terhadap pengetahuan politik; 2) Untuk meningkatkan partisipasi serta kesadaran masyarakat 3) Untuk mencerdaskan generasi muda khususnya pemilih pemula akan pentingnya pengetahuan dan partisipasi politik khususnya. Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi, Masyarakat desa Sempa jaya. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM berupa sosialisasi untuk warga desa Sempajaya dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2024, disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan PKM warga desa Sempajaya dalam memahami pentingnya partisipasi politik, baik dalam proses pemilu maupun mengawal berjalannya pembangunan daerah.

Kata kunci - Penyuluhan, Pemilihan, Kepala Daerah

Abstract

PKM activities consist of socializing the importance of first-time voter participation for the Sempajaya Village community in facing the 2024 general elections. The objectives of this PKM are 1) To increase the community's understanding of political knowledge; 2) To increase public participation and awareness. 3) To educate the younger generation, especially first-time voters, about the importance of political knowledge and participation in particular. The implementation of this PKM activity was carried out through the socialization method for the Simpa Jaya village community. Based on the results of the implementation of PKM activities in the form of outreach for Sempajaya village residents in facing the 2024 general elections, it was concluded that with the PKM activities Sempajaya village residents understood the importance of political participation, both in the election process and overseeing regional development.

Keywords - Counseling, Elections, Regional Heads

PENDAHULUAN

Pilkada langsung telah dilaksanakan sejak tahun 2005, dan sejak tahun 2015 dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Putaran pertama pemilukada dilaksanakan di 8 provinsi, 170 kabupaten, dan 26 kota di Indonesia pada tanggal 9 Desember 2015, dan pada putaran berikutnya, pemilukada putaran kedua dilaksanakan di 7 negara bagian, 18 kota, dan 76 daerah pada bulan Februari. . 15 Tahun 2017. Pada tanggal 27 Juni 2018, telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah putaran ketiga di 17 negara bagian untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta 115 distrik untuk memilih pemimpin dan pemimpin. dan terpilihnya walikota dan wakil walikota di 39 kota. Semakin banyak pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan, maka kematangan demokratis warga negara akan terlihat.(Sutrisno Cucu, 2017). Setelah tiga putaran pemilu daerah tunggal, pemilu daerah akan diadakan di seluruh negeri pada tahun 2024.

Menurut Triono pemilukada juga merupakan salah satu indikator sistem demokrasi: Pemilihan Kepala Daerah (pemilukada) memang menjadi salah satu indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya. Melalui pemilukada rakyat bisa memilih Kepala Daerahnya. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia pemilukada menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil (jurdil) serta langsung, umum, bebas dan rahasia (luber). Pemilukada juga menjadi sarana lima tahunan pergantian kekuasaan dan kepemimpinan Daerah.(Triono, 2017)

Sedang Basariyadi mengatakan bahwa, pentingnya pemilukada dalam negara demokrasi senada dengan tujuan penyelenggaraan pemilukada itu sendiri, yaitu di samping membuka peluang untuk terjadinya pergantian kekuasaan dan kepemimpinan daerah, sekaligus momentum untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah daerah (Bisariyadi, 2012).

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negara mempunyai hak untuk membuat keputusan yang mengubah hidup mereka. Demokrasi memungkinkan masyarakat India untuk berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan dalam merancang, mengembangkan dan mengadopsi undang-undang. Perkembangan program administrasi publik berkaitan dengan perkembangan ilmu administrasi publik yang seringkali menimbulkan permasalahan pengetahuan, yang terlihat dengan mengganti model lama dengan model baru. Nicholas Henry melihat adanya pergeseran paradigma dalam pergeseran fokus dan fokus kurikulum keilmuan. Hasil model ini menegaskan gagasan proyek politik/organisasi lain dengan mengaitkannya dengan suatu nilai/identitas budaya. Jadi semua yang diteliti oleh para ahli administrasi publik pada lembaga-lembaga administrasi memberikan warna dan keakuratan ilmu dan kebenaran pada administrasi publik, namun kajian kebijakan ini adalah kajian ilmuwan politik (Bawono, 2008). Persoalan partisipasi politik atau partisipasi sosial tidak dapat dilepaskan dari modelnya karena partisipasi sosial sangat erat dengan kajian kebijakan. Persoalan administrasi publik tidak bisa dilepaskan dari persoalan politik, misalnya saja persoalan pemilihan kepala daerah..

Oleh sebab itu peran partisipasi masyarakat sangatlah kuat dalam proses penentu dalam pemilihan umum. tidak hanya menjadi penonton saja dalam pesta demokrasi atau pemilihan umum melainkan juga ikut serta berperan aktif secara langsung dalam menyeleksi dan menentukan calon yang mana yang harus kita pilih demi kepentingan dan kemajuan baik di daerah, provinsi maupun secara nasional. Demokrasi merupakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintahan berdasarkan keinginan dari rakyat. jika dilihat dari sudut pandang keorganisasian merupakan sebagai suatu kegiatan negara yang dilaksanakan oleh rakyat atas persetujuan dari rakyat itu sendiri karena kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat.(Amin Rais,2020)

Sudah saatnya kita sebagai kaum intelektual yang paham akan pemilu memberikan sebuah pemahaman serta pembelajaran kepada masyarakat pentingnya pemilu demi memilih pemimpin yang kita anggap mampu memegang Amanah yang diinginkan sehingga masyarakat tidak tersesat kedalam

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

sebuah jurang kesalahan saat melakukan pemilihan kandidat dalam pesta demokrasi atau pemilu. Adanya pemahaman pemilu terhadap masyarakat dengan mengadakan kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan yang positif yang harus terus konsisten dalam pelaksanaannya untuk kebermanfaatannya bagi masyarakat sehingga masyarakat harus mengetahui dan memahami tentang pentingnya Pemilu dan memilih para wakil rakyat (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, 2012). Selain memberikan arahan-arahan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan demokrasi, masyarakat Indonesia harus terus diingatkan dan pemahaman tentang cara-cara memilih dan memberikan hak suaranya dengan sebaik-baiknya dan bukan hanya disebabkan pengaruh atau hasutan dari pihak lain yang tidak menguntungkan untuk masyarakat.

Demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia sudah terasa selama sepuluh tahun sejak dimulai pada tahun 1999. Banyak berbagai proses yang penuh dengan dinamika yang terjadi dalam proses perjalanan demokrasi. Penyelenggaraan Pilkada telah dilaksanakan sebanyak tiga kali dengan empat Kepala Daerah yang berbeda setelah masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pilkada ini bertujuan memilih calon kepala Daerah yang baik. Dalam perjalanan proses demokrasi telah mengalami banyak perubahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amandemen UUD 1945, kebebasan berpendapat dan pers, serta pemisahan yang jelas antara Rakyat Sipil dan Militer adalah beberapa di antaranya. Pasti, mereformasi sistem demokrasi kita menjadikannya lebih dinamis. Sejak Era Reformasi, muncul berbagai partai, yang mencerminkan kebebasan berdemokrasi dan kebebasan berekspresi sebagai ciri Negara demokratis (Saiful, 2013). Demokrasi adalah cara pemerintahan di mana semua orang di negara tersebut memiliki hak yang sama dalam membuat keputusan yang dapat memengaruhi hidup mereka. Demokrasi melibatkan partisipasi warga negara Indonesia baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam menyusun, mengembangkan, dan membuat hukum. Perkembangan paradigma administrasi negara berhubungan dengan ilmu administrasi publik mengalami krisis akademis beberapa kali, seperti terlihat dari pergantian paradigma lama dengan yang baru. Nicholas Henry melihat perubahan pandangan dalam sebuah disiplin ilmu berdasarkan pergeseran lokus dan fokusnya. (Milbrath, 1997)

Pemilihan kepala daerah langsung telah dilakukan sejak tahun 2005 dan dimulai secara bertahap dari tahun 2015 di seluruh wilayah Indonesia. Pemilihan Umum Serentak tahap pertama telah berlangsung di 8 Provinsi, 170 Kabupaten, dan 26 Kota di Indonesia pada 9 Desember 2015. Selanjutnya, Pemilihan Kepala Daerah serentak tahap kedua di 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten juga telah dilaksanakan pada 15 Februari 2017. Pada 27 Juni 2018, dilakukan pemilihan kepala daerah serentak tahap ketiga di 17 Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 115 Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di 39 Kota. Semakin banyak Pemilu yang dilaksanakan, seharusnya semakin menunjukkan kedewasaan berdemokrasi warga negara. Setelah tiga tahap pemilihan kepala daerah serentak, selanjutnya akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional pada tahun 2024 (Sutrisno Cucu, 2017). Pemilihan kepala daerah adalah momen penting yang mencerminkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah. Namun, dalam perkembangan pilkada di Indonesia, masih terdapat banyak kekurangan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa dalam sebuah pemilihan kepala daerahnya dianggap sebagai kegiatan rutin lima tahunan yang mengurus anggaran publik, sementara hasil dari pemilihan tersebut masih belum dapat menghasilkan pemimpin daerah yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat daerah. Pastinya hal ini memerlukan perhatian, sebagai masukan berharga bagi penyelenggara pemilu, untuk meningkatkan pelaksanaan pemilu di masa depan dan membuatnya lebih baik (Ardiantoro, Juri, 2017)

METODE

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode Diskusi. Diskusi dilakukan untuk menyampaikan materi sehingga masyarakat tertarik dalam melakukan kegiatan Pemilihan daerah di Bulan November.

Waktu dan Tempat

Kegiatan pengabdian masyarakat ini akan dilaksanakan pada Desa Sempajaya pada tanggal 8 Oktober 2024 dengan di hadiri masyarakat di sekitar Kantor desa dan Mahasiswa Prodi Hukum dengan jumlah ± 20 orang.

Pelaksanaan pengabdian

Adalah : 1. Tim pengusul pengabdian mengadakan observasi ke desa Simpa Jaya . 2. Tim melakukan pengabdian di desa Sempajaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan munculnya UU No. 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan-aturan pengganti berikutnya yang menjadi landasan normatif bagi penerapan pilkada secara langsung telah membuat sistem pemerintahan di daerah seharusnya semakin demokratis karena rakyat dapat menentukan siapa calon yang paling disukainya. Tentu saja, kehadiran Pesta Demokrasi sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam semua tahapan Pemilihan Umum. Dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, hasilnya nantinya Pemilihan Umum yang demokratis akan terwujud sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kesadaran masyarakat terhadap partisipasi politik sangat penting, terutama dalam hubungannya dengan Negara berkembang. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan pelaksanaan kegiatan baik secara individu maupun melalui organisasi dan kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Dengan ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik, termasuk memilih wakil rakyat yang akan menjadi pimpinan Negara dipilih oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Para calon wakil rakyat yang terpilih akan berpengaruh pada kehidupan dan kebijakan (Sitepu, 2012)

Salah satu bentuk dan proses demokrasi di daerah adalah melalui pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pilkada adalah wujud dari kedaulatan rakyat.dan konfirmasi bahwa pemilih adalah warga setempat. Pemilihan Kepala Daerah memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.Yaitu:1. Milih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak bareng masyarakat di daerah jadidiharapkan ngerti serta nyatakake kehendak masyarakat di daerah. 2. Melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diharapkan pilihan masyarakat di daerahdidasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon Kepala Daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 3.Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah cara untuk mempertanggungjawabkan, mengevaluasi, dan mengontrol seorang Kepala Daerah serta kekuatan politik yang mendukungnya. Jadi, dari ketiga fungsi di atas maksudnya ialah melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)tersebut masyarakat di daerah dapat menyimpulkan apakah akan memilih pejabat publik yang sama atau memilih pejabat publik lain yang bisa memimpin daerahnya untuk lebih profesional dan mendapatkan keberhasilan memimpin daerahnya ke depan, apakah organisasi politik mereka masih dapat dipercaya atau tidak. Maka dari itu, sebagai bagian dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus dijalankan dengan semangat demokratis sehingga benar-benar bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Tak terkecuali dari kasus yang sangat meresahkan masyarakat, yaitu adanya pelanggaran dan kelemahan yang dapat merusak demokrasi dalamPemilihan Kepala Daerah, harus diperbaiki dan dicegah.

Semangat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada sungguhlah penting. Pasalnya, masyarakatlah yang akan memilih kepala daerah. Peranan Masyarakat sangatlah penting karena masyarakat memiliki hak memilih dan pengaruh yang cukup besar pada proses demokrasi. Masyarakat merupakan tokoh yang memilih secara langsung. Tentunya berperan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

penting dalam memenangkan proses pemilihan kepala daerah tersebut. Namun, belakangan ini partisipasi masyarakat turun drastis karena berbagai faktor penyebab. Masyarakat menganggap siapapun calonnya siapaun yang terpilih pasti hidup saya tidak akan ada perubahan dan akan seperti itu-itu saja. Sehingga pentingnya pemahaman terhadap masyarakat akan hal ini sudah menjadi Pekerjaan dan tanggungjawannya bersama dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap partisipasi pemilu sebagai proses demokrasi yang sudah berjalan di Indonesia.

Penyelenggara Pilkada sudah berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam proses penyelenggaraan pilkada, dan bersedia memberikan suara mereka secara langsung saat pelaksanaan pilkada berlangsung nantinya. Selaku badan penyelenggara pilkada di Indonesia, KPU telah berupaya agar masyarakat tidak apatis terhadap pilkada. Salah satu strategi yang dijalankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran dan partisipasi dalam pilkada adalah dengan memberikan pendidikan politik kepada pemilih. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh penyelenggara pilkada, serta oleh seluruh elemen masyarakat. Pilkada memiliki peran krusial dalam menentukan nasib bangsa, termasuk dalam memilih Kepala Daerah. Pentingnya masyarakat dalam berperan langsung terhadap pemilihan kepala daerah tentu memiliki manfaat yang cukup besar untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat bagaimana cara memilih dan mencoblos secara langsung sehingga masyarakat memiliki peran dalam pemilu; dengan demikian, masyarakat paham akan peran mereka dalam pesta demokrasi tersebut. Selain memberikan pemahaman yang disosialisasikan kepada masyarakat, pendidikan demokrasi juga bermanfaat untuk mengedukasi masyarakat mengenai demokrasi dan pentingnya peran masyarakat dalam mensukseskan terselenggaranya pilkada. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada yang Jurdil. Usaha yang sedang dilakukan adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, komisi pemilihan umum telah berusaha sebaik mungkin untuk menarik minat dari pemilih pemula agar mau berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pentingnya partisipasi pemilih pemula sebagai pembelajaran untuk berpartisipasi dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Dengan memberikan pemahaman kepada pemilih pemula adalah langkah penting dalam mengedukasi mereka, sehingga mereka tidak akan asal dalam menentukan pilihannya. Di Indonesia sendiri, pemilih dengan rentang usia 18 tahun ke atas yang masih berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa, selalu dianggap sebagai pemilih yang suaranya penting untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, komisi pemilihan daerah berusaha agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam Pilkada. Semua pihak sepakat bahwa tidak baik jika pemilih pemula tidak memiliki pandangan politik, atau suaranya terombang-ambing dalam pilkada.

Strategi dilakukan untuk menarik masyarakat agar bersedia memberikan hak-hak suara mereka. Pemilih pemula merupakan pemilih yang masih muda, sehingga strategi yang digunakan pun harus modern dan menarik bagi anak muda. Misalnya menyelenggarakan kegiatan di tingkat desa tempat tinggal dengan mengundang dan melakukan pertemuan Masyarakat dan calon kepala daerah tersebut dan para calon kepala daerah menyodorkan proposal ke masyarakat serta mengadakan perbincangan dan diskusi terkait program kerja apa bila terpilih menjadi tersebut. Melalui pertemuan politik dan agenda-agenda seperti itu, diharapkan pemilih dan masyarakat tidak lagi dijadikan boneka atau penonton semata dalam pesta demokrasi. Sehingga dalam pemilu, masyarakat harus turut berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan pemilihan umum.



Gambar 1.

Tim PkM bersama mahasiswa dan sebagian Peserta penyuluhan



Gambar 2.

Ketua Tim PkM memberikan penyuluhan ke masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengabdian masyarakat, dan hasil pembahasan yang telah dikaji Negara yang demokratis memiliki kelebihan tersendiri, baik dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat memegang peran yang penting dalam sebuah Negara demokrasi karena peran mereka memiliki kekhususan yang sangat berarti. Peranan masyarakat terhadap partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memegang peranan penting dalam menentukan hasil pemilihan eksekutif dan legislatif, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Alasan yang mendasari perlunya mengadakan pendidikan politik yang harus diketahui dan dipahami oleh

masyarakat adalah agar dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang akan datang, tidak terjadi kesalahan dalam memilih kepala daerah yang diinginkan, dan bukan sekadar mengikuti orang lain. Pendidikan politik yang bagus pasti akan menghasilkan masyarakat yang pintar, kritis, sehingga mereka tidak akan keliru dalam memilih pemimpin mereka. Dengan begitu, cita-cita, keinginan, dan harapan masyarakat dapat tersalurkan dengan baik dan diterjemahkan menjadi tindakan oleh pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Kepala Desa dan masyarakat Desa Sempajaya yang menjadi lokasi tempat kami melakukan Pengabdian kepada Masyarakat. Dimana Kepala desa dan masyarakat menyambut kami dengan terbuka. Dan kepada Yayasan Bukit Barisan Universitas Quality Berastagi yang sudah memberikan bantuan dana kepada kami Dosen dan Mahasiswa Prodi Hukum untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat di desa Sempajaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Rais. (2020). Pengantar Dalam Demokrasi dan Proses Politik,. LP3ES.
- Ardiantoro, Juri, 2017, Catatan Singkat Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017, Jurnal 10 Perludem
- Bawono, Muhammad. 2008. "Persepsi dan Perilaku Memilih Terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Legislatif 2004 di Kabupaten Nganjuk". Jurnal m'power No.8 Vol.8.
- Bisariyadi, (2012). "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional. Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 3.
- Milbrath, L., & Goel, M.L. 1997. Political Participation. Chicago: Rand McNally College Publishing Co.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. (2012). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi.
- Saiful Arif dan Heri Setiyono. (2013). Sejarah & Budaya Demokrasi, Manusia Berstatus Warga dalam Kehidupan Beberapa Negara,. Averroes Press.
- Sitepu, P. Anthonius. 2012. Teoriteori Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sutrisno Cucu, 2017, Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 2, Nomor 2
- Triono, 2017, Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019, Jurnal Wacana Politik, Volume 2, No. 2